



FUNGSI DALIHAN NA TOLU DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL: STUDI KASUS PILKADES 2021 DI DESA LUMBAN JULU, TAPANULI UTARA

Asima Lumbantoruan, Bakhrul Khair Amal

Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam dinamika politik lokal pada Pilkadaes tahun 2021 di Desa Lumban Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu menjadi landasan sosial dan politik yang mempengaruhi strategi kampanye serta pilihan politik masyarakat. Namun, ditemukan pergeseran nilai di mana pihak boru tidak selalu mendukung hula-hula sesuai adat, mencerminkan kesadaran politik individu. Analisis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf menegaskan bahwa ketegangan dalam distribusi kekuasaan mendorong perubahan sosial. Kesimpulannya, Dalihan Na Tolu tetap berfungsi sebagai perekat sosial-politik sekaligus beradaptasi dengan nilai demokrasi modern dalam transformasi politik lokal.

Kata Kunci: Dalihan Na Tolu, politik lokal, kekerabatan, Pilkadaes, teori konflik.

PENDAHULUAN

Dalihan Na Tolu merupakan filosofi kehidupan yang telah menjadi fondasi budaya masyarakat Batak Toba selama berabad-abad. Konsep ini mencerminkan tatanan sosial dan hubungan kekerabatan yang erat melalui tiga pilar utama: *somba marhula-hula* (menghormati pihak pemberi istri), *elek marboru* (menyayangi pihak

perempuan/anak perempuan), dan *manat mardongan tubu* (berhati-hati dalam berinteraksi dengan sesama saudara). Prinsip-prinsip ini bukan hanya mengatur interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan adat, ekonomi, bahkan dalam dinamika politik lokal.

Desa Lumban Julu di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu

*Correspondence Address : asimalumbantoruan79@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v12i7.2025.2713-2717

© 2025UM-Tapsel Press

wilayah yang masih kuat memegang nilai-nilai adat dan menjunjung tinggi sistem kekerabatan tradisional. Masyarakatnya hidup berdampingan dalam semangat gotong-royong dan solidaritas sosial yang kuat, yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Dalihan Na Tolu. Kedekatan hubungan antarkeluarga yang tinggal dalam satu dusun secara turun-temurun menjadi cerminan nyata bagaimana nilai-nilai ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, perkembangan dinamika sosial-politik modern terkadang menimbulkan tantangan terhadap pelaksanaan nilai-nilai tradisional tersebut. Hal ini terlihat dalam peristiwa Pilkades tahun 2021 di Desa Lumban Julu, di mana terjadi fenomena yang cukup unik dan tidak biasa. Dalam pemilihan tersebut, terdapat dua calon kepala desa: satu berasal dari pihak *hula-hula* dan satu lagi dari luar kekerabatan Dalihan Na Tolu. Menariknya, sebagian dari pihak *boru* justru tidak memberikan dukungan kepada *hula-hula*-nya sendiri, melainkan memilih kandidat lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Padahal, dalam kerangka Dalihan Na Tolu, pihak *boru* seharusnya menunjukkan rasa hormat dan dukungan kepada pihak *hula-hula* sebagai bentuk implementasi nilai *somba marhula-hula*.

Penyimpangan ini memunculkan ketegangan dalam hubungan kekerabatan dan bahkan memicu pertikaian dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai atau penyesuaian pemahaman masyarakat terhadap konsep Dalihan Na Tolu dalam konteks demokrasi modern. Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk mempertahankan adat dan nilai tradisi, namun di sisi lain, mereka juga memiliki hak politik individu untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional dan personal.

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, teori konflik Ralf Dahrendorf dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Dahrendorf, seorang sosiolog Jerman-Inggris, berpendapat bahwa konflik dalam masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan merupakan hasil dari distribusi kekuasaan yang tidak merata. Dalam bukunya *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959), ia menjelaskan bahwa struktur sosial pada dasarnya terdiri atas kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang tidak memilikinya. Ketegangan antara kedua kelompok inilah yang mendorong perubahan sosial.

Dalam konteks masyarakat Batak Toba, struktur sosial Dalihan Na Tolu menjadi fondasi penting dalam mengatur kehidupan sosial, budaya, dan politik. Ketiga kelompok dalam sistem ini—*hula-hula*, *boru*, dan *dongan sabutuha*—memiliki peran yang berbeda-beda, termasuk dalam hal otoritas sosial. Meskipun Dalihan Na Tolu sering dianggap sebagai sistem yang menjaga harmoni, dari sudut pandang teori Dahrendorf, sistem ini menyimpan potensi ketegangan akibat distribusi kekuasaan yang tidak setara. Kelompok *hula-hula*, misalnya, sering dianggap memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, baik dalam ranah adat maupun sosial-politik.

Dalam peristiwa Pilkades 2021, ketegangan muncul ketika dukungan tidak lagi diberikan secara otomatis berdasarkan hubungan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas tradisional, di mana kelompok seperti *boru* mungkin merasa tidak lagi wajib tunduk pada kehendak *hula-hula* jika pilihan politik mereka berbeda. Pilkades pun bukan sekadar proses demokrasi formal, tetapi juga menjadi arena konflik kekuasaan antara kelompok adat yang dominan dan kelompok yang

sebelumnya berada dalam posisi subordinat.

Menurut Dahrendorf, konflik ini justru menjadi motor penggerak perubahan sosial. Ketika kelompok yang merasa kurang memiliki kekuasaan melihat peluang dalam sistem demokrasi lokal seperti Pilkades, mereka dapat menantang struktur tradisional dan memperjuangkan posisi yang lebih setara. Dengan demikian, Pilkades dapat menjadi titik tolak pergeseran kekuasaan dari sistem adat menuju konfigurasi politik yang lebih terbuka dan egaliter.

Oleh karena itu, memahami peran dan fungsi Dalihan Na Tolu dalam Pilkades Lumban Julu tidak hanya sebatas melihat bagaimana nilai-nilai adat dijalankan, tetapi juga perlu ditinjau dari perspektif konflik dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Dengan menggunakan lensa teori Dahrendorf, kita dapat melihat bahwa ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi politik modern adalah hal yang wajar dan bahkan berpotensi membawa perubahan sosial yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami peran sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam dinamika politik lokal, khususnya pada Pilkades tahun 2021 di Desa Lumban Julu, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat umum yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Alat bantu yang digunakan dalam proses ini antara lain pedoman wawancara, alat perekam,

catatan lapangan, serta dokumen pendukung seperti transkrip dan arsip desa.

Penelitian ini bersifat eksploratif dengan rancangan naturalistik, artinya seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan di lapangan secara langsung dan dalam konteks sosial yang alami. Fokus penelitian bukan pada variabel kuantitatif, melainkan pada tema-tema sosial yang mencakup fungsi Dalihan Na Tolu dalam kehidupan masyarakat, hubungan antara struktur adat dan orientasi politik, serta bagaimana jaringan kekerabatan memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam Pilkades.

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara induktif untuk menemukan pola dan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Karena bersifat kualitatif, penelitian ini tidak menggunakan model statistik, namun menjamin keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta keterlibatan langsung peneliti dalam konteks sosial masyarakat Batak Toba. Rujukan metodologis utama dalam penelitian ini mencakup karya Creswell (2019), Moleong (2022), dan Suyanto (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Toba di Desa Lumban Julu bukan hanya merupakan struktur kekerabatan dan adat istiadat, tetapi juga memainkan peran strategis dalam proses politik lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, ditemukan bahwa struktur sosial ini sangat memengaruhi dinamika politik desa, baik dari sisi dukungan, strategi kampanye, hingga pascapemilihan.

Dalam konteks pencalonan kepala desa, individu yang mencalonkan diri sangat mempertimbangkan relasi Dalihan Na Tolu, karena posisi sebagai hula-hula, dongan tubu, atau boru memiliki implikasi politik yang besar. Calon kepala desa cenderung membangun dukungan melalui jaringan kekerabatan tersebut, misalnya dengan menggalang solidaritas dari dongan tubu sebagai basis pendukung utama, menghormati hula-hula sebagai pemegang otoritas adat yang disegani, dan memanfaatkan hubungan boru untuk memperluas jaringan sosial-politik.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu seperti *somba marhula-hula* (menghormati pihak pemberi istri), *manat mardongan tubu* (berhati-hati dengan saudara semarga), dan *elek marboru* (menyayangi pihak penerima istri) turut memengaruhi perilaku politik masyarakat. Pemilih cenderung mendengarkan saran dari tokoh adat atau hula-hula dalam menentukan pilihan, yang menunjukkan bahwa preferensi politik sangat terikat pada otoritas moral dalam struktur Dalihan Na Tolu.

Hal ini menjadikan proses pemilihan bukan hanya soal memilih pemimpin administratif, tetapi juga tentang siapa yang dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai adat. Diskusi-diskusi di ruang publik informal seperti lapo tuak menjadi ajang untuk menguji kelayakan para calon dari sudut pandang adat, bukan semata-mata dari visi-misi atau program kerja yang ditawarkan.

Setelah Pilkades berlangsung, Dalihan Na Tolu kembali memainkan perannya sebagai perekat sosial. Perbedaan pilihan politik tidak serta-merta memecah hubungan kekerabatan, karena masyarakat Batak Toba tetap menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan saling menghargai. Acara-acara adat

pasca-pemilihan seperti syukuran, gotong royong, atau pertemuan keluarga besar menjadi media rekonsiliasi dan konsolidasi sosial, di mana semua pihak kembali dipersatukan dalam semangat Dalihan Na Tolu. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas masyarakat desa. Oleh karena itu, peran Dalihan Na Tolu tidak hanya penting dalam kehidupan adat dan budaya, tetapi juga sangat relevan dalam konteks politik lokal, terutama dalam membentuk karakter kepemimpinan, membangun legitimasi sosial, serta menciptakan suasana politik yang harmonis dan berkelanjutan di Desa Lumban Julu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu memegang peran penting dalam dinamika politik lokal di Desa Lumban Julu, khususnya dalam pelaksanaan Pilkades. Dalihan Na Tolu tidak hanya menjadi dasar struktur sosial dan adat, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam membangun dukungan politik, memengaruhi pilihan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial pascapemilihan.

Hubungan antara hula-hula, dongan tubu, dan boru sangat menentukan strategi kampanye calon kepala desa dan keputusan politik masyarakat. Namun, terdapat indikasi pergeseran nilai, di mana pihak boru tidak selalu memberikan dukungan kepada hula-hula sebagaimana prinsip tradisional, yang menunjukkan adanya kesadaran politik individual yang mulai menantang otoritas adat. Fenomena ini sejalan dengan teori konflik Ralf Dahrendorf, yang melihat konflik sebagai pendorong perubahan sosial dan distribusi kekuasaan yang lebih adil.

Dengan demikian, meskipun Dalihan Na Tolu tetap menjadi instrumen

utama dalam membangun solidaritas sosial-politik, sistem ini juga sedang beradaptasi dengan nilai-nilai demokrasi modern. Ketegangan antara tradisi dan modernitas tersebut mencerminkan proses transformasi sosial menuju tata kelola politik lokal yang lebih inklusif dan mampu merefleksikan aspirasi masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aginda, R. (2022). Perilaku Politik Masyarakat dalam Pilkades Gunung Tiga OKU. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(1), 65-78.
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. *Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179-188.
- Amanda, H. (2024). Analisis hubungan kekeluargaan dalam perilaku politik masyarakat pada pemilihan Kepala Desa Aro tahun 2022 (*Doctoral dissertation, Universitas Jambi*).
- Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 81-98.
- Creswell, J. W. (2019). Research Disign Pendekatan Kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajaran*.
- Haryanto, S. (2020). Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern. *Jogjakarta: AR-Ruzz Media*
- Hidayat, M. S., & Wardani, S. B. E. (2022). Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 75-87.
- Hutabarat, R. T. (2023). Perilaku Memilih Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Kepala Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 1-21.
- Junaidi, K., & Lestari, T. (2021). Peran Kekerabatan dalam Pemenagan Pemilihan Kepala Desa Menjalin Tahun 2018. *Jurnal Sociopolitico*, 3(2), 88-96.
- Mentari, A., & Harahap, M. I. (2024). Peran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Paloh Naga Kec. Pantai Labu. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 308-311.
- Mirsa, S., & Imran, M. (2022). Politik Kekerabatan Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jssha Adpertisi Journal*, 2(2), 29-43.
- Moleong, L. J. (2022). Metode penelitian kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*
- Ningsih, F. N. W. (2022). *Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan calon kepala desa di Desa S-1 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rahmatunnisa, M. (2021). Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 4(2), 295-316.
- Rajamarpodang, G. (1992). Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. *Medan: CV. Amanda*
- RIZALDI, E. (2021). Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo (*Doctoral dissertation, Ilmu Hukum*).
- Sadat, A. Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Masyarakat Dalihan Na Tolu.
- Suyanto & Sutinah. (2022). Metode Penelitian Sosial. *Jakarta: Kencana*
- Upe, A., Nur, M. J., & Suaib, E. (2022, June). Kontestasi Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 104-108).
- Zainal, A., Zainal, M. A., Rafiah, W. A., & Kina, W. K. W. (2021). Relasi Kekerabatan Patronase Masyarakat Muna. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27-42.